



**PIMPINAN DAERAH  
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN  
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA  
(PD FSP RTMM-SPSI)**



**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*National Union of The Cigarette Tobacco Food Beverage & Allied Worker's Federation*

**PERNYATAAN SIKAP**

**PD FSP RTMM-SPSI DIY**

**KETUA**

Waljidi Budi Lestarianto

**WAKIL KETUA**

Nurkholis Fauzan

**WAKIL KETUA**

Ani Setiawan

**WAKIL KETUA**

David Wahyu W

**SEKRETARIS**

Y. Budi Wibawa

**WAKIL SEKRETARIS**

Ismiyati

**WAKIL SEKRETARIS**

Ningrum Yuli Wulandari

**BENDAHARA**

Triatun

**WAKIL BENDAHARA**

Dewi Sintha N Lamusu

**ANGGOTA PD FSP RTMM**

**SPSIDY:**

1. PUK FSP RTMM-SPSI  
PT. CAHAYA MULIA  
PERSADA NUSA  
Kab. Bantul
2. PUK FSP RTMM-SPSI  
PT. YOGYAKARTA  
TEMBAKAU INDONESIA  
Kab. Bantul
3. PUK FSP RTMM-SPSI  
PT. PUTRA PATRIA  
ADIKARSA  
Kab. Kulonprogo
4. PUK FSP RTMM-SPSI  
PT. MITRA ADI JAYA  
Kab. Sleman
5. PUK FSP RTMM-SPSI  
PT. Sukanda Djaya  
Kab. Sleman

Industri Hasil Tembakau (IHT) saat ini masih merupakan sawah ladang sebagai mata pecaharian bagi ribuan anggota kami. Kami selaku pimpinan FSP RTMM-SPSI DIY sangat khawatir mengenai rencana kenaikan Cukai Hasil tembakau (CHT) yang dapat berdampak pada kelangsungan lapangan pekerjaan sebagian besar anggota kami, terbukti dengan terus menurunnya kinerja industri hasil tembakau saat ini, seperti dari data kementerian Perindustrian, produksi hasil Industri Hasil Tembakau dari tahun 2014 hingga tahun 2018 anjlok/turun 12 miliar batang (nasional).

Belum lagi dengan ditambahnya banyak kebijakan yang menghambat Industri Hasil Tembakau, seperti kenaikan cukai setiap tahunnya, gencarnya kampanye gerakan anti rokok yang berlebihan, peraturan larangan merokok, serta pembatasan kegiatan promosi yang sangat eksklusif yang turut mempersulit perbaikan kinerja Industri Hasil Tembakau (IHT).

Mengingat banyaknya kebijakan yang menghambat keberlangsungan Industri Hasil Tembakau di DIY maka kami FSP RTMM-SPSI DIY menyatakan :

1. Menolak kenaikan Cukai Hasil Tembakau sebesar 23% karena dampaknya dapat merugikan pekerja. ( penurunan penghasilan dan bahkan PHK).
2. Keputusan kenaikan Cukai wajib memperhatikan masukan dari pekerja dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memasukan aspek kesejahteraan dan perlindungan pekerja rokok dalam pemanfaatannya.
4. Meninjau ulang/Revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kabupaten/kota di DIY.

Hal ini penting kami sampaikan agar tidak terjadi penurunan kesejahteraan sampai yang paling fatal adalah PHK masal terhadap anggota FSP RTMM-SPSI di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari sektor Industri hasil Tembakau (IHT).

Demikian hal ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 30 September 2019

**Waljidi Budi Lestarianto**  
Ketua

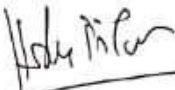
**Y. Budi Wibawa**  
Sekretaris

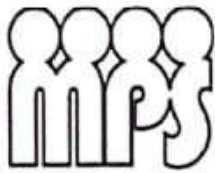
5. Susanto ..... PUK PT. PPA ..... 

6. Joko Wahyudi ..... Ketua Paguyuban MPS-I ..... 

**MENYETUJUI**

wakil/ Ketua DPR Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  
.....  
Huda T-y



# DEKLARASI

KAMI, PARA PEKERJA MITRA PRODUKSI SIGARET  
ANGGOTA  
FSP RTMM-SPSI

BERSAMA INI KAMI MENYATAKAN BAHWA ;

1. DALAM RANGKA MEMBUAT PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HARUS DIBUAT SECARA BERIMBANG, TIDAK SALING MERUGIKAN BAIK BAGI PEROKOK MAUPUN BAGI YANG ANTI ROKOK.
2. DI TEMPAT YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MEROKOK HENDAKNYA DIBUATKAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK, SEPERTI DI WARUNG MAKAN, RESTAURAN DAN PERHOTELAN.
3. IKLAN ROKOK DI WARUNG, JALAN RAYA DAN TEMPAT LAIN YANG DIPERBOLEHKAN MEROKOK TETAP DIJINKAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
4. SEMUA PASAL DAN AYAT YANG ADA PADA PERDA KTR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MERUJUK PADA PAYUNG HUKUM YANG ADA (Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012)
5. PERNYATAAN INI AKAN DIKUTI OLEH PERATURAN WALI KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, BANTUL DAN KULONPROGO.

DEMIKIAN DEKLARASI KAMI UNTUK DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

YOGYAKARTA, 30 SEPTEMBER 2019

## DEKLARATOR,

| Nama                  | Perusahaan           | Tanda Tangan |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1. <u>Wahid Budi</u>  | PD FSP RTMM-SPSI DIY |              |
| 2. <u>ADI SURANTO</u> | PUK PT. YTI          |              |
| 3. <u>DAVID LATU</u>  | PUK PT. MAJ          |              |
| 4. <u>TRIASUN</u>     | PUK PT. CMPN         |              |